

Model Komunikasi Harmonis Antarpemeluk Agama di Sorong Papua Barat

The Harmonious Communication Model on Among Religious Adherents in Sorong, West Papua

Ali Nurdin¹, Pudji Rahmawati², Sulhawi Rubba³

^{1,2,3}Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya
^{1,2,3}Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8410298 Fax.031-8413300

ali.nurdin@uinsby.ac.id¹, pudji.rahmawati@uinsby.ac.id², sulhawisheh408@gmail.com³

Diterima: 6 Desember 2019 || Revisi: 14 Agustus 2020 || Disetujui: 7 September 2020

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan model komunikasi harmonis antarpemeluk agama, serta faktor pendukung dan penghambat terjadinya komunikasi harmonis di Kota Sorong, Papua Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami proses dan model komunikasi antar pemeluk agama. Subjek penelitian ini tokoh lintas agama di Kota Sorong berjumlah tujuh informan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa proses komunikasi harmonis antarpemeluk agama dilakukan melalui tahapan penataan harmoni dan produktivitas. Tahapan penataan harmoni dilakukan melalui proses menanamkan rasa saling pengertian, toleransi, dan saling menghormati antarpemeluk agama. Tahapan ini menghasilkan produktivitas yaitu terwujudnya kerukunan antarumat beragama, dan melahirkan model komunikasi harmonis yang dibangun berdasarkan kerukunan, toleransi, dan kerja sama. Faktor pendukung komunikasi harmonis adalah adanya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), peran agama dan budaya, dan implementasi konsep hidup berbagi sebagai karakter khas masyarakat Papua. Faktor penghambatnya adalah adanya kesenjangan sosial-ekonomi, mudahnya nilai adat kebersamaan akibat arus modernisasi, dan komunikasi yang tidak efektif antara pemimpin lokal dengan rakyat, serta dengan pemimpin nasional.

Kata Kunci: Model Komunikasi Harmonis, Produktivitas, Beda Agama

Abstract: This research objective is to describe the process and model of harmonious communication among religious adherents and the supporting and inhibiting factors for the occurrence of harmonious communication in Sorong, West Papua. This research uses a qualitative approach with descriptive research to understand the process and model of communication between religious adherents. The research subject of interfaith leaders in Sorong amounted to 7 informant. The data collection method was done by interview and documentation techniques. Furthermore, the research result is a description of the process of harmonious communication among religious adherents carried out through the stages of structuring harmony and productivity. While, the stages of structuring harmony are carried out through the process of instilling mutual understanding, tolerance, and mutual respect among the adherents of the religion. The steps have resulted in productivity, namely; the realization of harmony among religious communities, and rised to a harmonious communication model that was built based on peace, tolerance, and cooperation. Supporting factors for harmonious communication are the role of the "Forum on Religious Harmony" (FKUB) and the role of religion and culture. The factor of inhibiting is the existence of socio-economic inequality and ineffective communication between local leaders and communities and national leaders.

Keywords: Harmonious Communication Model, Productivity, Religious Diversity

PENDAHULUAN

Keragaman budaya dan agama dapat menimbulkan permasalahan dalam realitas kehidupan masyarakat. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan benturan sosial yang berlatar belakang agama, ras, suku, dan antarkelompok sosial dalam masyarakat. Benturan sosial dapat disebabkan oleh doktrin agama dan budaya yang berbeda, bahkan adanya mayoritas dan minoritas pemeluk agama (Syarifuddin, 2014). Konflik hubungan antaragama dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam beragama, fanatisme yang berlebihan (negatif), cara

penyampaian pesan agama yang *keliru*, problema sasaran dakwah, dan ketidakadilan dalam berperilaku pada agama orang lain (Aisyah, 2014).

Hasil survei yang dirilis oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Bimbingan Masyarakat, Agama, dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama RI tentang indeks kerukunan umat beragama di Indonesia dalam tiga tahun terakhir, 2015, 2016, dan 2017 mengalami fluktuasi penurunan, namun tidak signifikan. Perlu adanya evaluasi dan pencermatan ulang mengapa fluktuasi kecil ini dapat terjadi. Data survei indeks kerukunan umat beragama tahun 2015 menunjukkan

tingkat kerukunan tinggi di atas rata-rata nasional, 75.36 (Ulum & Budiyo (Editor), 2016). Tahun 2016 mengalami kenaikan 0,11 yaitu 75,47 (Didah, 2016). Tahun 2017 masuk dalam kategori baik dengan skor nilai 72,27 (Didah, 2017). Tahun 2017 mengalami penurunan indeks sebesar 3,2 yang diukur dari indikator toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Tahun 2017, Papua Barat masuk dalam kategori indeks kerukunan antar umat beragama pada urutan pertama di Indonesia (Asianto, 2017).

Penelitian Ismail Suardi Wekke menjelaskan bahwa Sorong merupakan kota yang menjadi milik bersama masyarakat dengan multiagama. Kerukunan dan toleransi antaragama masyarakat sangat harmonis. Masyarakat antara pemeluk agama yang satu dengan agama yang lain hidup berdampingan dan saling kerja sama. Meskipun demikian, peluang adanya hambatan dalam hubungan antaragama masih terbuka lebar seiring dengan derasnya arus perkembangan teknologi informasi dan perubahan sosial dalam masyarakat (Wekke, 2016).

Rosyid dalam penelitiannya menjelaskan bahwa salah satu kunci utama untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan dan juga jalan keluar dari berbagai konflik antaragama yakni dengan meningkatkan kualitas interaksi, reaksi dan komunikasi antar warga yang berlatar belakang berbeda dari berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek agama. Kerukunan antar umat beragama dapat terwujud atas dukungan kesadaran atas kesamaan budaya, ekonomi, adanya ikatan kekeluargaan dan pertemanan, serta tidak adanya tokoh penggerak konflik (Rosyid, 2014).

Hamdani dalam penelitiannya menyatakan bahwa akulturasi budaya Islam dan Kristen mampu merajut harmonisasi sosial dan kerukunan beragama di kalangan masyarakat multireligius, atas dasar saling menghormati dan menghargai sesama (Hamdani, 2017). Sumai juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa interaksi antar umat beragama memerlukan dramaturgi untuk memainkan peran masing-masing identitas agama yang dapat melahirkan keharmonisan antar umat beragama. Efek dari dramaturgi ini mengakibatkan luntarnya nilai-nilai sakral keagamaan (Sumai *et al.*, 2018).

Penelitian Anshari menyatakan bahwa tokoh agama memainkan peran penting dalam membangun harmonisasi antar pemeluk agama. Tokoh NU memiliki peran sebagai pengendali kehidupan bermasyarakat sekaligus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan berperan

dalam menjaga kerukunan antar pemeluk agama di Kota Sorong. Peran ini dimainkan untuk menjaga dan mewujudkan harmonisasi antar pemeluk agama (Anshari, 2013).

Menurut hasil penelitian Ismail Suardi Wekke, penganut agama selain menjalankan tradisi yang mereka yakini, mereka juga berusaha secara total mempertahankan harmoni antarpemeluk agama lain. Kondisi harmonis hubungan antarpemeluk agama ini tidak lahir secara spontan, namun mereka berusaha hidup berdampingan yang dibangun dengan proses yang lama untuk menuju kehidupan harmonis sebagaimana kehidupan dalam satu keluarga yang harmonis (Wekke, 2013). Huda juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa budaya toleransi dilatarbelakangi oleh pemahaman ajaran agama yang substantif-inklusif, kebijakan politik yang pluralis, tradisi sosio-kultur yang toleran, tradisi perkawinan beda agama yang terjaga. Empat hal ini menjadi faktor penting dalam membangun kerukunan dan toleransi antar umat beragama (Huda, 2017).

Penelitian Nazmudin menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat global dan majemuk, kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar. Cara mengelola kemajemukan tersebut adalah dengan pendekatan dialog antarumat beragama yang dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan untuk meminimalisir isu-isu sensitif dan prasangka dalam kehidupan antarumat beragama secara bersama (Nazmudin, 2018).

Penelitian tentang komunikasi harmonis dalam keluarga dapat diambil sebagai pijakan bahwa untuk menuju kondisi hubungan yang harmonis perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut; pertama, perlunya kredibilitas komunikator dalam menyampaikan pesan keumatan. Kedua, pesan harus disampaikan dengan penuh kasih sayang dengan mengedepankan penyelesaian masalah secara *win-win solution*. Ketiga, memiliki kemampuan mendengar yang aktif sehingga pesan yang diterima dapat dimaknai secara jernih dan cerdas untuk menuju keharmonisan (Ratnasari, 2007). Penelitian Suhaidi menjelaskan bahwa ada tiga kunci untuk menuju kehidupan harmonis dalam keragaman agama dan budaya, yaitu adanya silaturahmi, dialog dan kegiatan sosial yang dapat menjadi perekat hubungan sosial di antara pemeluk agama (Suhaidi, 2014).

Hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas dapat dijadikan sebagai landasan dan acuan yang kuat dalam penelitian tentang model komunikasi

harmonis di Sorong sebagai upaya untuk menemukan sebuah model dan dapat dijadikan sebagai *pilot project* percontohan bagi kehidupan dalam keragaman agama dan budaya di Indonesia.

Berdasarkan data dan hasil penelitian di atas, kondisi kerukunan antar agama di Kota Sorong dalam suasana toleran dan harmonis. Namun, masih ada benih-benih yang dapat menimbulkan benturan antar agama yaitu aspek ketidakadilan, kesetaraan, dan upaya kemerdekaan rakyat Papua. Peneliti melihat suasana hubungan yang kondusif antar pemeluk agama inilah yang mendorong terjadinya proses yang harmonis antarpemeluk agama dan melahirkan sebuah model komunikasi yang menarik untuk diteliti.

Salah satu contoh nyata adanya suatu masyarakat yang dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai adalah masyarakat Kota Sorong, Papua Barat yang memiliki penganut agama berbeda yaitu; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Sebuah potret kehidupan keberagaman yang telah berkembang dan terpelihara sejak lama yang dapat dijadikan sebagai model bagi daerah-daerah lain yang penduduknya menganut beragam agama.

Fenomena komunikasi antarpemeluk agama di Kota Sorong dapat dianalisis dalam perspektif teori negosiasi muka (*Face-Negotiation Theory*) dan teori pengelolaan identitas. Teori negosiasi muka memberikan dasar untuk memperkirakan bagaimana manusia akan menyelesaikan karya rupa (muka) dalam kebudayaan yang berbeda. Muka (rupa) mengacu pada gambar diri seseorang dihadapan orang lain yang melibatkan rasa hormat, kehormatan, status, koneksi, kesetiaan, dan nilai-nilai lain yang serupa. Muka dalam gambaran diri orang lain dalam situasi sosial (Littlejohn & Foss, 2008).

Komponen-komponen dari teori negosiasi muka meliputi muka, konflik, dan budaya. Secara spesifik teori ini memiliki asumsi-asumsi yaitu; pertama, identitas diri penting di dalam interaksi interpersonal, dan individu-individu menegosiasikan identitas mereka secara berbeda dalam budaya yang berbeda. Kedua, manajemen konflik dimediasi oleh muka dan budaya, dan ketiga, tindakan-tindakan tertentu mengancam citra diri seseorang yang ditampilkan (muka) (West & Turner, 2010).

Teori negosiasi muka sangat sesuai untuk menggambarkan muka (rupa) pemeluk agama ketika berinteraksi dengan pemeluk agama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Muka (rupa) identitas

agama telah menyatukan rupa-rupa lain dalam warna kebinekaan yang tunggal. Muka nilai, hormat, kesetiaan, dan status menjelma menjadi muka/rupa kemajmukan yang harmonis dalam keragaman agama dan budaya.

Teori pengelolaan identitas digunakan untuk mendeskripsikan fenomena kehidupan multiagama dan budaya. Teori ini dikembangkan oleh Tadasu Todd Imahori dan William R. Cupach yang berusaha menjelaskan bagaimana identitas terbentuk, terjaga, dan berubah dalam hubungan. Teori ini menjelaskan tentang hubungan adanya perbedaan budaya sangat penting dalam membangun interaksi (Littlejohn & Foss, 2008).

Perbedaan agama dan budaya dapat mengancam muka/rupa individu ketika berinteraksi dengan yang lain. Imahori dan Cupach memberikan penjelasan melalui empat cara benturan budaya dapat terjadi dan harus dihindari. Pertama, individu merasa terbatas ruang geraknya atau tersudutkan dalam bentuk-bentuk budaya tertentu dan tidak diterima sebagai seseorang yang utuh dan kompleks. Imahori menyebut sebagai kebekuan identitas (*identity freezing*). Kedua, individu menemukan terkadang nilai budaya mereka diabaikan. Ketiga, tekanan antara mendukung rupa sendiri dan rupa orang lain. Keempat, tekanan antara ingin menegaskan sebuah nilai budaya (rupa positif), tetapi tidak ingin menghalangi atau membatasi (rupa negatif) (Littlejohn & Foss, 2008).

Teori pengelolaan identitas digunakan untuk mengeksplorasi pengelolaan identitas yang dilakukan oleh pemeluk agama yang berbeda dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang harmonis dalam suasana multi agama dan multi etnik.

Berdasarkan data dan fenomena tentang kehidupan komunikasi harmonis antarumat beragama di Kota Sorong Papua Barat yang telah dideskripsikan di atas, penelitian ini sangat menarik dan penting untuk mengkaji permasalahan proses dan model komunikasi harmonis antarpemeluk agama, dan faktor yang mendukung dan menghambat komunikasi. Tujuan penelitian untuk memahami dan mendeskripsikan proses komunikasi yang terjadi antarumat beragama yang menghasilkan model komunikasi harmonis, dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam komunikasi sehari-hari. Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana mengembangkan model komunikasi antarumat beragama dan sebagai *pilot*

project bagi kehidupan antarumat beragama yang berbasis kerukunan, toleransi, dan kerjasama.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami hubungan antar pemeluk agama secara deskriptif (Sugiono, 2011). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap tujuh informan dengan teknik *purposive sampling* yaitu; pemuka agama Kristen, Islam, Katolik, Hindu, dan Buddha yang berlokasi di Kota Sorong tahun 2019 untuk memahami proses dan model komunikasi antaragama. Teknik dokumentasi dilakukan untuk menelaah sebaran data pemeluk agama di Kota Sorong. Data yang diperoleh dianalisis dengan kategori yang ditentukan yaitu proses, model, dan faktor pendukung dan penghambat komunikasi antarpemeluk agama. Pendapat para informan ini memiliki kompetensi, otentitas, kredibilitas dan validitas sebagai pemuka agama. Setelah kategorisasi data didapatkan kemudian diberi interpretasi dengan menyandingkan teori negosiasi muka dan teori pengelolaan identitas yang menghasilkan temuan model komunikasi harmonis antarpemeluk agama (Kriyantono, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong tahun 2018 tanggal 22 Agustus 2019 jumlah penduduk Kota Sorong adalah 247.084 jiwa yang terdiri atas 128.861 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 118.223 perempuan. Data dari Kantor Kementerian Agama Kota Sorong tahun 2018 tanggal 6 Agustus 2019 jumlah pemeluk agama dapat dipetakan yaitu jumlah pemeluk agama Kristen Protestan 133.892 (44,46%), Katolik 24.583 (8,16%), Islam 140.164 (46,54), Hindu 670 (0,22%), dan Buddha 1.822 (0,60%). Jumlah tempat peribadatan yaitu Kristen Protestan memiliki 263 gereja dan 30 Pos PI, Katolik memiliki 7 gereja, Islam memiliki 93 masjid dan 39 surau, Hindu memiliki 1 Pura, dan Buddha memiliki 2 Vihara. Jumlah rohaniawan yaitu Kristen Protestan memiliki 5.199 rohaniawan, Katolik 38 rohaniawan, Islam 161 rohaniawan, Hindu 5 rohaniawan, dan Buddha memiliki 15 rohaniawan.

Proses Komunikasi Harmonis Antarpemeluk Agama di Kota Sorong Papua Barat

Harmonis adalah sebuah kata kunci untuk menuju perubahan dan produktivitas. Komunikasi harmonis ditandai dengan adanya saling mengerti, memahami,

dan memengaruhi antara komunikator dengan komunikan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang harmonis. Proses komunikasi harmonis antarpemeluk agama harus dilewati melalui tahapan penataan harmoni dalam hubungan antaragama, dan selanjutnya tahapan yang menghasilkan produktivitas (Obd, Wawancara, 2019).

Sorong adalah sebuah kota yang memiliki penduduk multi etnik dan multi agama. Oleh karena itu komunikasi antaragama tidak dapat dihindari (Ahmd, Wawancara, 2019). Dalam kehidupan bermasyarakat yang multi agama, interaksi antarpemeluk agama hadir dalam keseharian masyarakat. Komunikasi hadir dalam lingkup pendidikan, kantor, pasar, olah raga, bahkan hadir dalam perayaan hari besar antaragama. Komunikasi harmonis dibangun melalui proses-proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat dalam semua lingkup peristiwa. Masyarakat harmonis didasarkan pada aspek komunikasi melalui proses berpikir analitis, logis, dan kreatif (Sabur, 2010) dari komunikasi yang kecil sampai pada skala komunikasi yang lebih besar.

Filosofi masyarakat Papua “satu tungku tiga batu” tidak hanya berlaku dalam kehidupan masyarakat. Filosofi ini juga berlaku bagi tiga kerukunan umat beragama yaitu internal agama, eksternal agama, dan antara agama dengan pemerintah. Menurut teori pengelolaan identitas, memahami hubungan yang dibangun berdasarkan perbedaan budaya sangat urgen dalam membangun interaksi (Littlejohn & Foss, 2008). Terbentuknya tri kerukunan antaragama di Papua berdampak pada adanya hubungan yang harmonis antarpemeluk agama (Obd, Wawancara, 2019).

Hubungan harmonis harus dimulai dari adanya rasa saling pengertian dan saling menghormati. Konsep saling pengertian dan saling menghormati dapat dimulai dari pemahaman tentang hak dan kewajiban bagi setiap pemeluk agama. Batasan hak dan kewajiban ini jika dipahami dan dikelola dengan baik maka akan tercipta hubungan yang harmonis atau kerukunan antaragama (Ptr, Wawancara, 2019).

Pemeluk agama Hindu memandang bahwa keharmonisan adalah sebuah keharusan yang selalu hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Ajaran agama Hindu memberikan arahan dan petunjuk bagi umat Hindu agar selalu mengedepankan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat (Gst, Wawancara, 2019). Kebersamaan yang sejati dalam komunikasi antarpemeluk agama dapat dibangun berdasarkan nilai-

nilai kebersamaan dengan mulai memahami tentang diri sendiri (Ptr, Wawancara, 2019).

Proses komunikasi harmonis juga dilakukan melalui perilaku saling menghormati pada pemeluk agama lain. Hal ini dapat dibuktikan ketika terjadi perayaan hari-hari besar yang memiliki hari dan tanggal yang sama dengan pemeluk agama lain. Misalnya; bagi pemeluk agama Islam, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha yang jatuh pada hari Minggu, tentu ini bersamaan dengan pemeluk agama Kristen yang juga harus datang beribadah ke gereja. Hal ini terlihat “sepele”, namun dalam realitasnya jika para pemeluk agama tidak saling menghormati dan menghargai akan memicu lahirnya konflik antaragama (Agg, Wawancara, 2019).

Komunikasi yang dilandasi dengan hati nurani akan melahirkan aura yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Pikiran yang positif berdampak pada energi positif dalam kehidupan dan melahirkan cahaya kebersamaan yang harmonis (Mutlb, Wawancara, 2019). Aura dan energi yang positif dapat menghilangkan prasangka antarpemeluk agama. Pikiran yang positif juga melahirkan konsep berbagi pada masyarakat.

Menurut keyakinan agama Buddha, untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan tersebut salah satu di antaranya adalah menjalin persahabatan yang baik di antara sesama (Mmn, Wawancara, 2019). Ini yang menandakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki ketergantungan dengan manusia yang lain.

Ada tiga jenis kerukunan dalam kehidupan yaitu kerukunan antara umat beragama (pemuka) dengan pemerintah, internal umat beragama, dan antar umat beda agama (Sudjangi, Ed, 1998). Kerukunan antar umat beragama tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan Jawa yaitu saling menghargai (toleransi), menghargai perbedaan, penghargaan, dan penghormatan pada roh leluhur, kebersamaan yang terwujud dalam kerja bakti atau gotong royong, tulus ikhlas, cinta damai, tidak diskriminasi, terbuka terhadap nilai-nilai dari luar dan konsisten (Fidiyani, 2013).

Konflik horizontal terjadi akibat gesekan sosial dalam kehidupan sosial yang ditandai adanya gejala-gejala intoleransi dengan berkembangnya aliran-aliran yang bebas dan tak terkendali yang melahirkan kelompok-kelompok teroris yang selalu hadir dalam ruang yang terbuka (Asshiddiqie, 2014a). Komunikasi harmonis harus diupayakan agar mendapatkan

produktivitas. Proses ini mengalami dinamika yang luar biasa, apalagi pada saat penelitian ini dilakukan terjadi konflik antar ras yang melibatkan etnis Papua dengan etnis pendatang yang bermula pada pembicaraan rasis ketika terjadi penyerbuan ke asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. Peristiwa ini berdampak terjadinya demonstrasi masyarakat Papua yang dimulai dari Manokwari dan berimbas pada pembakaran dan perusakan fasilitas-fasilitas publik di Kota Sorong seperti pengepungan dan perusakan bandara, pembakaran pertokoan, dan kios atau *lapak* pedagang kaki lima yang semuanya adalah milik para pendatang.

Penerapan paradigma teologis inklusif menjadi sangat penting dalam konteks kehidupan modern. Paradigma ini mengakui prinsip keberadaan komunitas lain, keinginan untuk “bertegur sapa”, dan selalu mencari titik temu dalam semangat kehidupan di era modern (Sunaryo, 2012).

Dalam perspektif teori negosiasi muka (rupa) seseorang dapat ditampilkan melalui rasa hormat, kehormatan, status, koneksi, kesetiaan, dan nilai-nilai lain yang serupa. Muka dalam gambaran diri orang lain dalam situasi sosial. Diri memahami dengan baik apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan mengetahui hak dan kewajiban dalam diri sendiri akan memantulkan sinar kebersamaan pada orang lain. Sinar kebersamaan tercermin dalam penempatan posisi dirinya ketika berhubungan dengan orang lain, baik komunikasi internal agama, eksternal antar agama, maupun dengan pemerintah. Dalam tahapan teori pengelolaan identitas dikenal istilah percobaan, kecocokan, dan negosiasi ulang (Littlejohn & Foss, 2008).

Menurut teori pengelolaan identitas (Littlejohn & Foss, 2008), tahap percobaan (*trial*) dapat diawali dengan menempatkan posisi diri dalam berhubungan dengan orang lain. Tahapan ini memiliki peran urgen dalam membangun keharmonisan beragama. Penempatan posisi diri dalam komunikasi antar agama yang tidak pada tempatnya dapat memicu lahirnya konflik horizontal dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut teori negosiasi muka penempatan posisi dalam berhubungan berkaitan dengan identitas diri secara personal ketika sedang berinteraksi. Identitas diri dibangun melalui negosiasi yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan dipengaruhi oleh latar belakang budaya, bahkan agama.

Tahap kecocokan (*emmeshment*) dilakukan untuk menuju proses komunikasi harmonis yang dilatarbelakangi oleh hati nurani yang ikhlas dan jujur. Pada umumnya masyarakat asli Papua memiliki karakteristik sebagai orang yang mengedepankan nurani dan kejujuran. Suku asli Kota Sorong adalah suku MOI yang memiliki hati yang halus dan penuh kesabaran. Suku Moi terbiasa hidup dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan saling berbagi dan memberi.

Tahap negosiasi ulang (*renegotiation*) dilanjutkan ketika dalam hubungan telah memiliki kecocokan. Komunikasi yang dilandasi dengan hati nurani akan melahirkan kecocokan dan aura yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Pikiran yang positif berdampak pada energi positif dalam kehidupan dan melahirkan cahaya kebersamaan yang harmonis. Aura dan energi yang positif dapat menghilangkan prasangka antarpemeluk agama. Pikiran yang positif juga melahirkan konsep berbagi pada masyarakat.

Berdasarkan analisis di atas, elemen komunikasi harmonis adalah pilar kerukunan antarumat beragama yang melengkapi tiga kerukunan yang selama ini berkembang yaitu intern umat beragama, antarumat yang berbeda agama, dan antara umat beragama (pemuka) dengan pemerintah (Sudjangi, Ed, 1998). Tiga kerukunan ini dibingkai dalam model komunikasi harmonis, dan menjadi pilar yang sangat penting dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Model Komunikasi Harmonis Antarumat Beragama di Kota Sorong Papua Barat

Model kesetaraan mendeskripsikan aspek kesetaraan sebagai modal menuju harmoni dalam hubungan. Komunikasi antarpemeluk agama yang dilandasi adanya kesetaraan dalam hubungan akan melahirkan harmonisasi dalam hubungan sebagai kata kunci untuk meraih produktivitas (Obd, Wawancara, 2019).

Ketidaksetaraan dalam komunikasi yang dibangun antarpemeluk agama, bahkan antara pejabat lokal dengan masyarakat akan melahirkan kesenjangan dalam kehidupan sosial. Kesenjangan ini akan semakin terlihat jika pola perilaku pejabat tidak mencerminkan keinginan masyarakat pada umumnya (Obd, Wawancara, 2019).

Aspek kesetaraan dalam komunikasi harus dibangun melalui adanya saling toleransi dan menghargai antarpemeluk agama. Kasus kerusuhan yang terjadi di tanah Papua sepanjang pertengahan bulan Agustus 2019 adalah sebuah contoh tidak adanya

kesetaraan dan saling menghargai antaretnis yang ada (Ptr, Wawancara, 2019). Kerusuhan dan kekacauan di tanah Papua ini adalah imbas adanya konflik politik pada tingkat nasional. Terjadinya fitnah dan adu domba antaretnis dan agama dapat menimbulkan kebencian dan sentimen dengan aroma agama yang terjadi secara lebih luas terjadi di nusantara.

Kesetaraan antaragama juga sudah dibangun melalui kebijakan-kebijakan politik yang populer di tanah Papua. Misalnya, kebijakan yang dilakukan pada tokoh agama dari Kristen dan Islam. Bagi tokoh-tokoh Kristen diberangkatkan ke Israil, sementara bagi tokoh-tokoh Islam diberangkatkan naik haji. Ini adalah sebuah contoh aspek kesetaraan yang terjadi antarpemeluk agama yang ada di tanah Papua (Ahmd, Wawancara, 2019).

Model kesetaraan dalam komunikasi tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Orang Papua dikenal dengan rasa toleransi dan saling berbagi antarsesama. Komunikasi antarpemeluk agama terjalin harmonis, bahkan komunikasi ini terjalin dalam satu keluarga yang harmonis. Satu keluarga yang memiliki struktur dalam keluarga berbeda agama. Orangtuanya beragama Kristen dengan anak yang beragama Islam. Mereka dalam satu keluarga yang memiliki rasa saling terikat satu sama lain, saling mengasihi, dan saling menyayangi sebagai satu kesatuan keluarga. Mereka saling memahami kepercayaan dan keyakinan tentang agama yang dipeluk tanpa harus melakukan intervensi keyakinan pada keluarga yang lain. Mereka hidup dalam kerukunan dan penuh harmonis (Mutlb, Wawancara, 2019).

Kunci model kesetaraan dalam komunikasi antarpemeluk agama adalah adanya kebersamaan (Ptr, Wawancara, 2019). Dalam kebersamaan tersebut terdapat rasa saling memahami dalam hubungan. Konsep memahami tidak mengenal paksaan dalam mengikuti agama apa yang dianut. Komunikasi yang dibangun berdasarkan asas kebersamaan dalam kehidupan sosial harus dapat menerima kondisi apa adanya tentang kepercayaan dan keyakinan yang diikuti pemeluk agama lain sebagai mitra komunikasi.

Filosofi masyarakat Papua yang telah terpatri dalam hati dan diimpelemtasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah filosofi model satu tungku tiga batu. Model ini merupakan implementasi toleransi yang telah meresap dalam kultur masyarakat Papua. Model ini menggambarkan toleransi sebagai dasar kerukunan antarpemeluk agama. Satu tungku yang ditopang dengan tiga batu untuk menyalakan api dan digunakan

untuk memasak dalam keluarga (Obd, Wawancara, 2019).

Model satu tungku tiga batu adalah perumpamaan dalam kehidupan masyarakat Papua yang mencerminkan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbeda agama dan etnis. Bentuk kerukunan dan persatuan dalam model satu tungku tiga batu adalah tiga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari pemerintah, adat, dan agama. Tiga elemen masyarakat ini harus disatukan dalam pandangan bersama untuk mencapai kehidupan yang harmonis antarpemeluk agama.

Model satu tungku tiga batu juga diibaratkan sebagai model kerukunan antarumat beragama dalam sebuah keluarga. Dalam kehidupan keseharian masyarakat Papua terdapat kehidupan dalam satu keluarga yang memiliki anggota keluarga berlainan agama yang dianut. Dalam satu keluarga dapat terdiri atas penganut agama Kristen, Katolik, dan Islam. Mereka hidup dalam satu atap keluarga. Mereka hidup dalam suasana kerukunan, kesetaraan, toleransi, dan penuh persaudaraan. Ikon masyarakat Papua dan Sorong adalah “kitorang bersaudara” yang artinya semua orang adalah bersaudara (Ahmd, Wawancara, 2019).

Model satu tungku tiga batu sebagai filosofi masyarakat Papua telah memberikan gambaran yang jelas tentang model komunikasi harmonis antarpemeluk agama. Beragam etnis dan agama menyatu dalam satu kesatuan masyarakat yang harmonis.

Kerukunan antarumat beragama juga dilakukan dalam bentuk saling kerja sama untuk membentuk harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Tempat tinggal yang cenderung membaur di antara para pemeluk agama memberikan peluang mereka saling kerja sama dan hidup dalam kerukunan. Heterogenitas agama yang berkembang dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai potensi dan peluang terjadinya kerja sama antarpemeluk agama. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk gotong royong dalam membersihkan tempat ibadah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada (Gst, Wawancara, 2019). Bentuk harmonisasi yang seringkali dilakukan umat Buddha di Kota Sorong adalah bakti sosial yang mengajarkan kepada umat Buddha agar bersikap dermawan dan suka menolong kepada siapapun artinya tidak harus kepada sesama umat Buddha sendiri, tetapi juga ke umat yang lain (Mmn, Wawancara, 2019).

Menurut teori negosiasi muka, bangunan komunikasi dalam masyarakat dipengaruhi oleh dua hal yaitu *kolektivisme individualisme* dan jarak kekuasaan (*power distance*). Aspek individualis adalah sebuah budaya yang menghormati individu melebihi kelompoknya. Budaya ini melihat aspek kewenangan dan kesuksesan seorang individu. Sementara itu aspek kolektivis dalam kebudayaan adalah kebudayaan yang menghormati komunitas atau kebersamaan di atas individu. Selanjutnya, aspek jarak kekuasaan yang dapat memengaruhi negosiasi rupa adalah jarak kekuasaan, yaitu sebuah hierarki atau status yang kuat yang dimiliki oleh seseorang untuk mengendalikan anggota-anggota atau kelompok lain dengan kewenangan yang dimiliki (Littlejohn & Foss, 2008).

Kerukunan umat beragama akan tumbuh ketika agama diberikan ruang untuk berdialog dalam ruang budaya tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain (Ismail, 2010). Salah satu kunci sukses dalam membangun komunikasi yang harmonis adalah kebersamaan yang sejati dalam hidup berdampingan dalam bermasyarakat. Dalam agama Hindu dikenal dengan istilah *Wasudewa Kutumbhakam* yaitu kita semua adalah bersaudara. Orang Papua mengatakan *Katong Samua Basodara* yaitu kita orang semua bersaudara. Filosofi ini dapat dipahami bahwa hidup di dunia ini ibaratnya satu keluarga besar. Sesama keluarga harus saling memahami dan membina satu sama lain sehingga dapat membangun kesepahaman bersama dan kebersamaan yang hakiki.

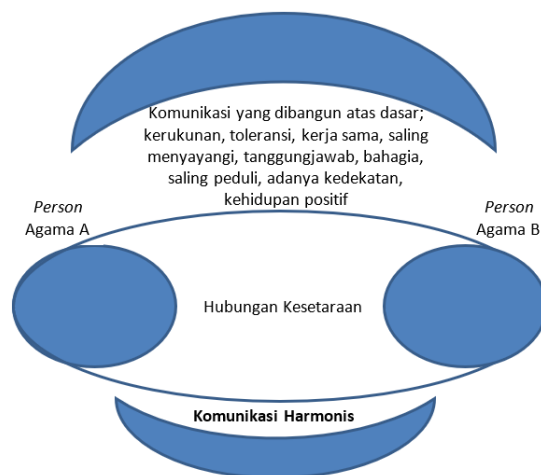
Model komunikasi harmonis melalui kerja sama antarpemeluk agama di Kota Sorong dilakukan melalui kegiatan saling membantu antarpemeluk agama yang berbeda dengan melakukan bakti sosial, saling silaturahmi, dan memberikan toleransi pada masing-masing pemeluk agama.

Model komunikasi harmonis yang dibangun di Kota Sorong, Papua Barat adalah model kesetaraan dan model satu tungku tiga batu sebagai bentuk kerja sama. Paham pluralisme memiliki kontribusi yang kuat dalam menciptakan komunikasi harmonis. Pemahaman tentang pluralisme dapat membentuk corak interaksi antarpemeluk agama secara terbuka dan toleran (Ali, 2016).

Perkembangan teknologi informasi yang cepat berdampak pada pola kehidupan masyarakat, tak terkecuali masyarakat Papua. Gempuran teknologi dan arus penyebaran informasi kekinian mampu menggeser nilai-nilai budaya keseharian masyarakat. Kehidupan

sosial dan hubungan antaragama pada masyarakat Papua sangat harmonis yang ditandai dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki agama-agama yang dianut. Kerja sama antaragama terjalin sangat mesra dan dalam suasana damai. Salah satu contoh: Orang Kristen membantu pembangunan masjid bagi umat Islam, dan orang Islam kerja bakti untuk membersihkan gereja adalah contoh riil hubungan harmonis antarumat beragama di tanah Papua. Tradisi merawat hubungan harmonis ini di Papua di kenal dengan filosofi "satu tungku tiga batu". Filosofi ini dipedomani masyarakat Papua dengan mengimplementasikan hubungan antara pemerintah, adat/budaya, dan agama sebagai pola pikir yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Tiga elemen ini menyatu dan saling menyapa dalam kehidupan riil, tidak ada yang merasa lebih tinggi dalam membangun hubungan, saling menyapa dengan rasa, saling komunikasi dengan hati yang jernih, dan menyatu dalam satu tungku yang berisi keragaman latar belakang etnis dan budaya. Sayangnya, tradisi yang dibingkai *ala* Papua ini sejak tahun 1990 an mulai mengalami pergeseran secara substantif. Masyarakat kota dengan segala kesibukannya beralih kepada pola kehidupan yang lebih mementingkan mengejar materi dan menggeser pola kerja bakti dengan kegiatan yang bersifat ekonomis. Sistem kerukunan antaragama di masyarakat kota mulai kehilangan substansi dalam merawat filosofi yang dipedomani secara turun temurun. Terjadinya penurunan kualitas pada kegiatan sosial tersebut disebabkan adanya perubahan dari sistem kerja bakti dan gotong royong menjadi sistem upah yang berbasis kebutuhan sehingga sistem relasi berbasis kebersamaan mengalami pasang-surut (Syam, 2018). Masih ada harapan yang tersisa untuk merawat dan melestarikan filosofi satu tungku tiga batu yaitu pola kehidupan pada masyarakat yang tinggal di pedalaman Papua. Namun, sampai kapan tradisi ini bertahan ditengah gempuran arus globalisasi dan teknologi yang setiap saat dapat datang dan menggesernya dengan budaya-budaya baru yang dapat menjauhkan nilai-nilai positif yang selama ini dilakukan masyarakat. Ini adalah tanggungjawab bersama untuk merawatnya, khususnya masyarakat Papua.

Berdasarkan data yang terdapat dalam kategori proses dan model komunikasi antarpemeluk agama di Kota Sorong di atas, peneliti membuat skema model komunikasi harmonis ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Model Komunikasi Harmonis Antar pemeluk Agama

Model komunikasi harmonis di atas adalah prototipe (model) ideal yang menggambarkan peristiwa komunikasi antarpemeluk agama di Kota Sorong yang memiliki unsur-unsur kerukunan, toleransi, kerja sama, saling menyayangi, tanggungjawab, bahagia, saling peduli, adanya kedekatan, dan memperoleh kehidupan yang positif secara bersama.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Harmonis Antarumat Beragama di Kota Sorong Papua Barat

Hadirnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah faktor pendukung adanya komunikasi harmonis antarpemeluk agama. Meskipun fungsi dan peran lembaga ini belum optimal, namun keberadaannya masih sangat diperlukan bagi penyelesaian konflik antaragama yang terjadi. FKUB adalah media harmonisasi hubungan antarpemeluk agama untuk mengomunikasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaannya. FKUB juga merupakan wadah untuk komunikasi, sosialisai antarumat beragama agar kehidupan sosial mereka tidak bersifat eksklusif sehingga dapat terbangun koheisi sosial di kalangan umat beragama. FKUB membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan berbagai program pembangunan, khususnya di Kota Sorong (Mmn, Wawancara, 2019).

Faktor pendukung adanya komunikasi harmonis antarpemeluk agama di Kota Sorong adalah implementasi konsep berbagi dengan hati nurani. Karakter masyarakat Papua adalah suka berbagi antarsesama. Berbagi apa yang dimiliki dengan orang lain tanpa melihat agama yang dianut. Konsep berbagi

juga harus diikuti dengan hati nurani yang ikhlas (Mutlb, Wawancara, 2019).

Hambatan komunikasi harmonis antarpemeluk agama di Kota Sorong karena adanya faktor kesenjangan sosial-ekonomi antarwarga setempat. Kesenjangan ekonomi terjadi antara pejabat lokal dengan penduduk lokal Papua. Pejabat semakin kaya namun di sisi lain rakyat semakin sengsara. Disparitas ekonomi terjadi antara warga asli Papua dengan para pendatang. Faktor kesejahteraan menjadi pemicu konflik horisontal dalam masyarakat (Agg, Wawancara, 2019).

Masyarakat asli Papua belum memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk bekerja di swalayan, supermarket, bank, dan perkantoran-perkantoran lain. Daya saing sumber daya manusia masyarakat Papua masih sulit untuk bersaing dengan para pendatang. Hal ini mengakibatkan terpinggirnya warga asli Papua karena tidak mendapatkan pekerjaan di tanah kelahirannya sendiri (Obd, Wawancara, 2019).

Hambatan komunikasi juga terjadi karena faktor komunikasi yang tidak efektif antara tokoh atau pemimpin lokal dengan pemimpin nasional. Ada kesalahpahaman dalam memahami gejala yang terjadi di Papua. Ada perbedaan persepsi cara penanganan masalah Papua antara pemimpin lokal dengan nasional (Mutlb, Wawancara, 2019). Hambatan ini termasuk dalam kategori hambatan mekanika komunikasi yaitu kurangnya perencanaan komunikasi yang dilakukan dan kurangnya kemampuan membaca pesan sehingga menghasilkan komunikasi yang tidak efektif (Moekijat, 1993).

Komunikasi harmonis terhambat adanya faktor kebersamaan semu, yaitu kerukunan, keharmonisan, dan toleransi yang dipaksakan di antara para warga. Kebersamaan yang ditampilkan hanyalah sebuah pencitraan yang dibangun untuk menunjukkan keharmonisan dan kebersamaan tanpa saling mengenal dan memahami. Di sisi lain, mereka sendiri tidak mengetahui benar apa yang harus dilakukan. Mereka berkumpul dan saling berinteraksi namun tidak dengan hati nurani yang ikhlas. Kondisi ini merupakan fenomena yang unik, dan *gesekan* sosial suatu saat akan terjadi. Kerusakan yang terjadi di Papua atas kasus rasisme yang dilakukan oleh orang-orang Jawa hanya dijadikan sebagai pemicu awal meletusnya demonstrasi dan kerusakan di Papua tahun 2019 (Ptr, Wawancara, 2019).

Hambatan komunikasi harmonis antarpemeluk agama adalah mudahnya nilai-nilai adat leluhur yang dulu pernah dilestarikan dalam praktek kehidupan masyarakat seiring dengan arus deras kehidupan modernisasi yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat telah memengaruhi dan mengubah pola pikir masyarakat dalam membangun kebersamaan dan kerukunan antarpemeluk agama. Filosofi satu tungku tiga batu yang dipedomani masyarakat Papua sudah memudar dalam kehidupan kota. Model kerukunan ini masih bertahan di daerah-daerah pedalaman, namun sudah tidak terlalu signifikan seperti pada masa-masa lalu (Mutlb, Wawancara, 2019).

Ada landasan dalam kebebasan agama yang telah di atur di negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Landasan ini dijadikan sebagai dasar oleh pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dalam mencegah terjadinya konflik dan kekerasan atas nama agama (Sumbulah & Al Aluf, 2015).

Komunikasi harmonis perlu dilakukan dalam kontek-konteks yang lebih dapat dipahami antarpemeluk agama. Dalam komunikasi antarpemeluk agama perlu dilakukan dialog antaragama, dapat melalui forum yang dibentuk secara bersama, misalnya FKUB, dan lain-lain. Secara internal umat beragama dapat dilakukan dengan cara menafsirkan pesan-pesan agama secara universal melalui peran tokoh agama (Kahmad, 2006).

Masyarakat Indonesia termasuk dalam kategori masyarakat majemuk, *dual society*, dan *plural society*. Faktor yang mendukung pluralitas dan kemajemukan masyarakat Indonesia adalah keadaan geografis yang terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta menjadi kawasan strategis bagi menyebarnya agama dan budaya di kawasan Indonesia (Nasikun, 1989).

Komunikasi harmonis di Kota Sorong juga mengalami hambatan komunikasi. Hambatan dalam proses komunikasi adalah adanya suatu rintangan yang membuat terjadinya komunikasi tidak sesuai harapan peserta komunikasi (Cangara, 2000). Proses komunikasi lintas agama dipengaruhi dimensi personal yang meliputi aspek konsep diri, orientasi diri, persepsi, sikap, dan nilai diri (Uha, 2012).

Pluralitas agama menimbulkan konsep hukum yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi kemajemukan mempersulit terciptanya kerukunan hidup beragama dan unifikasi hukum yang

tidak dapat dihindari (Lubis, 2005). Keragaman agama dapat berfungsi sebagai pemilah dan sekaligus pemersatu bangsa, tergantung cara mengelolanya (Mulkhan, 1998). Aspek inilah yang dapat menciptakan kondisi kebersamaan semu.

KESIMPULAN

Proses komunikasi harmonis antarpemeluk agama dilakukan melalui dua tahapan yaitu penataan harmoni dan produktivitas. Elemen harmonis harus terpenuhi untuk mencapai tahapan produktivitas. Komunikasi harmonis dibangun melalui proses-proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam ruang lingkup peristiwa komunikasi yang kecil (tingkat lokal) sampai pada skala komunikasi yang lebih besar (tingkat nasional).

Model komunikasi harmonis antarumat beragama di Kota Sorong Papua Barat di rinci menjadi dua yaitu model kesetaraan dan model satu tungku tiga batu. Model kesetaraan mendeskripsikan aspek kesetaraan sebagai kunci menuju harmoni dalam hubungan. Model satu tungku tiga batu mengimplementasikan hubungan antara pemerintah, adat/budaya, dan agama sebagai pola pikir yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Tiga elemen ini menyatu dan saling menyapa dalam kehidupan riil, tidak ada yang merasa lebih tinggi dalam membangun hubungan, saling menyapa dengan rasa, saling komunikasi dengan hati yang jernih, dan menyatu dalam satu tungku yang berisi keragaman latar belakang etnis dan budaya. Kerja sama antaragama terjalin sangat mesra dan dalam suasana damai.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung komunikasi harmonis adalah Adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), adanya implementasi konsep berbagi dengan hati nurani, dan adanya peran agama dan budaya. Hambatan dalam komunikasi harmonis adalah adanya faktor kesenjangan sosial-ekonomi antarwarga setempat, adanya komunikasi yang tidak efektif antara pemimpin lokal dengan pemimpin nasional, adanya faktor kebersamaan semu, dan memudarnya nilai-nilai adat leluhur yang dulu pernah dilestarikan dalam praktek kehidupan masyarakat seiring dengan arus deras kehidupan modernisasi yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Sorong harus mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai jembatan menuju harmonisasi dalam hubungan antaragama. Kementerian Agama Kota Sorong harus mampu mengoordinasikan FKUB sebagai ruang

penyamaan persepsi bagi kerukunan antarumat beragama untuk meminimalisasi konflik yang terjadi dalam masyarakat. Lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi negeri dan swasta harus membuat model kerukunan antarumat beragama di Papua sebagai pijakan kerukunan antarumat beragama di tanah Papua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian di Sorong, Papua Barat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh informan di Sorong Papua Barat, Kementerian Agama Kota Sorong, Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Sorong, MUI Kota Sorong, Majelis Muslim Papua (MMP), dan semua pihak yang membantu kegiatan ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2016). *Harmonical Communication; Sebuah Pesan Damai Dalam Perbedaan*. Salatiga : LP2M Press, IAIN Salatiga.
- Anshari, M. J. (2013). Harmonisasi Antarumat Beragama di Papua. *Istiqro*, 12(01), 287–312. <http://istiqro.kemenag.go.id/index.php/istiqro/article/view/66>.
- Asianto, D. P. A. (2017). *Kota Sorong, Toleransi Umat Beragama Papua Barat Urutan Pertama di Indonesia*. <http://www.suarakarya.id/detail/47690/Kota-Sorong-Toleransi-Umat-Beragama-Papua-Barat-Urutan-Pertama-di-Indonesia>
- Asshiddiqie, J. (2014). Toleransi dan Intoleransi Beragama di Indonesia Pasca-reformasi”, Disampaikan dalam Dialog Kebangsaan tentang “Toleransi Beragama.” *Ormas Gerakan Masyarakat Penerus Bung Karno, Di Hotel Borobudur Jakarta, 13, 1–3*. <https://adoc.pub/toleransi-dan-intoleransi-beragama-di-indonesia-pasca-reform.html>
- Cangara, H. (2000). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Didah. (2016). *Indeks Kerukunan Umat Beragama 2016 Naik*. 6/2/2019. <https://www2.kemenag.go.id/berita/470394/indeks-kerukunan-umat-beragama-2016-naik>
- Didah. (2017). *Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2017 Kategori Baik*. <https://kemenag.go.id/berita/read/507241/indeks-kerukunan-umat-beragama-di-indonesia-tahun-2017-kategori-baik>
- Fidiyani, R. (2013). Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 468–482.

- <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.256>
- Hamdani, A. G. (2017). Akulturasi Budaya Islam–Kristen dalam Mewujudkan Kerukunan. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2), 101–122. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v2i2.476>
- Huda, S. (2017). Kampung Inklusif: Model Toleransi Antar Agama Di Balun Lamongan. *Al-Hikmah*, 1(1), 1–45. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/959>
- Ismail, A. (2010). Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 17(2), 175–186. <https://doi.org/10.18784/analisa.v17i2.36>
- Kahmad, D. (2006). *Sosiologi Agama*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi; Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2008). *Teori Komunikasi*, Jakarta: PT. Salemba Humanika.
- Lubis, R. (2005). Meretas Wawasan & Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia”. Jakarta : *Pus-Litbang Kemenag RI*.
- Moekijat. (1993). *Teori Komunikasi*. Bandung : Mandar Maju.
- Mulkhan, A. M. (1998). *Atas Nama Agama*. Bandung : Pustaka Hidayah.
- Nasikun. (1989). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.
- Nazmudin, N. (2018). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 23–39. <http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268>
- Ratnasari, A. (2007). Komunikasi Harmonis Orang Tua dengan Anak. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 8(2), 345–352. <https://doi.org/10.29313/mediator.v8i2.1247>
- Rosyid, M. (2014). Keselarasan Hidup Beda Agama dan Aliran: Interaksi Nahdliyin, Kristiani, Buddhis, dan Ahmadi Di Kudus. *Fikrah*, 2(1), 75–94. <http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v2i1.557>
- Sabur, B. R. (2010). *Materi-Materi Kuliah Filsafat Komunikasi*. Bandung : Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.
- St Aisyah, B. M. (2014). Konflik sosial dalam hubungan antar umat beragama. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 189–208. <https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.348>
- Sudjangi, Ed. (1998). *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Jakarta : Departemen Agama RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Suhaidi, M. (2014). Harmoni Masyarakat Satu Desa Tiga Agama di Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Madura. *Harmoni*, 13(2), 8–19. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_s89gRumu3gJ:https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/download/123/106+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id
- Sumai, S., Naumi, A. T., & Toni, H. (2018). Dramaturgi Umat Beragama: Toleransi dan Reproduksi Identitas Beragama di Rejang Lebong. *Kontekstualita*, 32(01), 118–143. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/Kontekstualita/article/view/33/13>
- Sumbulah, U., & Al Aluf, W. (2015). *Faktualisasi Relasi Islam-Kristen di Indonesia*. Malang : UIN Maliki Press.
- Sunaryo, A. (2012). Teologi Inklusif Nurcholis Madjid dan Pengaruhnya terhadap Fikih Lintas Agama di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.584>
- Syam, N. (2018). *Islam Nusantara Berkemajuan; Tantangan dan Upaya Moderasi Agama*. Semarang : Fatawa Publishing.
- Syarifuddin, S. (2014). Agama dan Benturan Peradaban. *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 229–242. <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v16i2.4931>
- Uha, I. N. (2012). *Komunikasi Lintas Budaya: Teori, Aplikasi dan Kasus Sosial Bisnis dan Pembangunan*. Sidoarjo : CV. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Ulum, R., & Budiyo (Editor). (2016). *Survei Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2015*. Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Kementerian Agama RI.
- Wekke, I. S. (2013). Islam di Papua Barat: Tradisi dan Keberagaman. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14(2), 117–134. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2652>
- Wekke, I. S. (2016). Harmoni Sosial dalam Keberagaman dan Keberagaman Masyarakat Minoritas Muslim Papua Barat. *Kalam*, 10(2), 295–312. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i2.3>
- West, R., & Turner, L. H. (2010). *Pengantar Teori Komunikasi; Analisis dan Aplikasi, Buku 2*. Jakarta : Salemba Humanika.

Halaman ini sengaja dikosongkan